

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SEBAGAI  
PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BONTO  
MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

**IKBAR**

**Nomor Stanbuk : 1056460409**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2016**

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SEBAGAI  
PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT DI KELURAHAN BONTO  
MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh

**IKBAR**

Nomor Stambuk : 1056460409

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITA MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2016**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

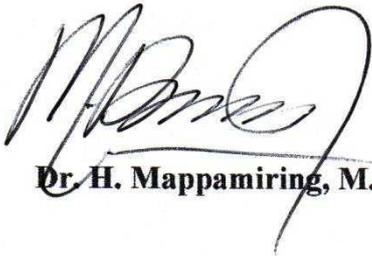
Nama Mahasiswa : Ikbar

Nomor Stambuk : 10564660409

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. Mappamiring, M.Si**

Pembimbing II



**Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM.**

Mengetahui,

Dekan,

Fisipol Unismu Makassar



**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



**Dr. A. Luhur Prianto, S.Ip., M.Si.**

## **PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1434/FSP/A.1-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2016.

## **TIM PENILAI**

Ketua,



**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.**

Sekretaris,

**Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.**

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si.
2. Dr. A. Luhur Prianto, S.ip., M.Si.
3. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si.
4. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikbar

Nomor Stanbuk : 1056460409

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar,       Maret 2016

Yang menyatakan,

Ikbar

## ABSTRAK

**IKBAR, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar, (dibimbing oleh Mappamiring dan St. Nurmeta)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif kemudian pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi dan wawancara dengan cara memilih informan melalui teknik *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil wawancara selanjutnya dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM merupakan wadah yang dekat dengan kepentingan masyarakat dan mengenal persoalan yang terjadi hal ini tergambar dari keaktifan LPM dalam Musrembang dengan menyampaikan usulan dari masyarakat berupa kebutuhan maupun persoalan yang ada di Kelurahan Botto Makkio. LPM juga sebagai mediator yaitu meyabungkan keinginan masyarakat terkait permasalahan yang ada dan aktif dalam mensosialisasikan beberapa program pemerintah kota seperti Makassar tidak rantasa dan lorong garden yang melibatkan peran serta masyarakat. LPM juga sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagi program pemerintah kota dan LPM juga sebagai dinamisator yang dapat dilihat dari peran aktif LPM dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan. Selain itu adanya dukungan dari sejumlah instansi dan anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program yang dicanangkan merupakan faktor pendukung demikian halnya dengan partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam program pembangunan. Sementara banyak usulan aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang tidak dapat dijadikan prioritas.

Kata Kunci : Peranan, LPM, Penyalur Aspirasi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. H. Mappamiring, M.Si** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan .
2. Bapak **Dr. Irwan Akib, M.Pd** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang sangat baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Staf Pengajar, baik Dosen maupun Asisten Dosen dan seluruh Staf Pegawai di Lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis.

6. Kedua Orang Tuaku yan tercinta, Ayahanda **Kahar** dan Ibunda **Petta Mera** yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, cucuran keringat dan air mata, untaian do'a, serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT akan terus menjagamu dan melindungimu, serta menyapamu dengan Cinta-Nya.
7. Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bonto Makkio serta semua pihak yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
8. Seluruh teman-teman yang tak henti-hentinya memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan sem angat kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

**IKBAR**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan .....	10
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	12
C. Aspirasi Masyarakat .....	17
D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	18
E. Kerangka Pikir.....	26
F. Fokus Penelitian .....	27
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Keabsahan Data.....	33

### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian .....	35
B. Peran LPM dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	44
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran LPM di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	62

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik ( *good governance* ) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelohan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, sesuai dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggara pemerintah yang tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Negara. Namun demikian hal tersebut akan dapat diatasi secara efektif dan efisien dengan adanya partisipasi masyarakat. Dengan membentuk suatu wadah organisasi masyarakat yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah. Banyaknya organisasi-organisasi ditingkat lokal sangat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat. Pembicaraan mengenai peranan pemerintah tidak lepas dari penilaian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dari fungsi atau operasi organisasi. Semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi maka

semakin baik pula hasilnya, dimana peranan merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan dapat berupa fisik material maupun non material. Pada kondisi negara yang normal, dimana sistem disegala bidang sudah tersusun baik, misalnya sistem demokrasi dan perundangan. Sistem peradilan, sistem bisnis dan sebagainya seperti negara maju.

Terkhusus pada sistem pemerintahan di daerah terdapat regulasi yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-undang No 23/2014 dijelaskan bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pemerintah untuk daerahnya dan masyarakatnya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas pada masing-masing daerah. Hal ini merupakan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Berbeda halnya dengan kondisi seperti yang dialami Indonesia saat ini, dimana bukan saja sistemnya, akan tetapi masih banyak yang belum tertata rapi, sehingga timbul krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dimana pemerintah harus dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa (*extra Ordinary*), sehingga memerlukan tolak ukur penilaian kinerja yang tidak biasa juga. Sesuai dengan Undang-undang Dasar

seperti saat ini, pemerintah yang tidak melakukan apa-apa. Asalkan tidak melanggar Undang-undang dan Haluan Negara tetap berhak untuk bertahan sampai akhir jabatan. Padahal kondisi masyarakat saat ini yang sudah benar-benar menuntut usaha perbaikan yang secara signifikan.

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Adanya suatu pembangunan disuatu wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintahan menuju arah perbaikan secara bertahap dan berencana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara komprehensif. Baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran,dll. Agar mereka memajukan dan mengembangkan usahanya , sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinanpun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjono (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya yang memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip pemberdayaan.

Pada masa sekarang dimana pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme *top down* yaitu proses

perencanaan pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah, berawal dari LKMD tersebut maka sesuai kesepakatan tentu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18 sampai 21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat disegala aspek yang ada. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran.

Peran LPM juga tergambar pada tingkatan Kota dimana terdapat Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar. Dalam aturan tersebut dijelaskan tentang tugas LPM yaitu menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Tentu pendekatan partisipatif yang dilakukan membutuhkan penyaluran aspirasi oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti LPM yang seharusnya mampu melakukan pendampingan dengan cara menyampaikan dan mengajak seluruh komponen Lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam menyusun usulan kegiatan pembangunan belum terpenuhi secara maksimal hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan Bonto Makkio. LPM juga harus mampu menyosialisasikan hasil usulan perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan kepada seluruh elemen masyarakat, memberikan pengarahan serta menggerakkan masyarakat di masing-masing wilayah RT/RW untuk selalu berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan namun sejauh ini sosialisasi yang dilakukan belum dapat diserap oleh masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio.

Melalui penjelasan latar belakang dan permasalahan yang diungkapkan maka peneliti melihat salah satu tujuan terbentuknya Lembaga Pemberdayaan masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat merupakan hal yang menarik untuk ditelusuri secara ilmiah, maka peneliti memilih judul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar” demi upaya peneliti untuk dapat mengetahui prosedur penyaluran

aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan BontoMakkio, Kecamatan Rappocini kota Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis :

Diharapkan penelitian ini, dapat menambah dan memperkaya pengetahuan serta referensi mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya yang terkait dengan penyaluran aspirasi masyarakat.

2. Manfaat dari segi praktis :

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi yang berkaitan sarana politik dan sosial, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman mengenai Pemberdayaan masyarakat sebagai penyalur aspirasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peranan**

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut E.St. Harahap, dkk, (2007: 854) mengemukakan bahwa peran berarti laku, bertindak. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

*Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Selanjutnya menurut Soekanto (2009) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan dua pengertian diatas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Masalah yang akan diteliti adalah berangkat dari peranan sehingga berdasarkan teori peranan adalah teori yang berkaitan dengan teori struktural fungsional. Teori ini menganggap bahwa orang menduduki posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peran. Teori Struktural Fungsional yang merupakan teori dasar atau "*Grounden Theory*", Selanjutnya penjelasan lain diungkapkan *Levinson* (dalam Soekanto 2009 : 213), menyatakan peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2009 : 212), "Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan". Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya". Pendapat diatas maka dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

dilihat dari hak atau capaian yang ingin dicapai sesuai dengan visi LPM adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembagunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

#### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan

kehidupan orang lain yang menjadi perhatian (Parsons, dkk, 2000). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategis, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia Barat. KTT pembangunan sosial di Copenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep

pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008 : 56) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan adalah (Taruna, 2001) *Human dignity*, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia *Empowerment*, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok Partisipatoris dan Adil.

Corak pemberdayaan diatas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana peran dari suatu program dapat menggali potensi dari masyarakat, mengangkat martabat masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosialnya secara adil dan berimbang. Corak pemberdayaan dalam (Taruna, 2001) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Human dignity*, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia yang meliputi :

- a. Martabat, potensi ataupun energi manusia itu inherent secara individual.
  - b. Human dignity itu merupakan tujuan akhir atau hasil akhir.
  - c. Bukan hanya tujuan akhir/hasil akhir, tetapi juga kunci dan inti.
  - d. Berada “di balik”, segala perkembangan.
  - e. Berawal dari konsep individual.
  - f. Bias “berlindung” di balik kemanusiaan.
  - g. Mudah dipakai sebagai alasan.
  - h. Dipakai sebagai basis/alasan untuk melindungi hak azasi.
2. *Empowerment*, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok yang meliputi :
- a. Fisik
  - b. Intelektual
  - c. Ekonomi
  - d. Politik
  - e. Kultural
- Dengan demikian pemberdayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total (*total human development*).
3. *Partisipatoris dan Adil* meliputi :
- a. Punya kesamaan hak memperoleh akses atas sumberdaya dan pelayanan sosial.
  - b. Menyangkut hak-hak dasar.
  - c. Berkembang dalam kesamaan.

d. Menguntungkan.

Demikian begitu pentingnya dan berharganya martabat manusia, potensi dan energi yang dimiliki manusia dalam hal ini. Dalam membentuk manusia seutuhnya sehingga pemberdayaan dapat dijadikan sarana untuk melindungi apa yang disebut Human dignity. Untuk mendukung tercapainya pemberdayaan dimaksud maka secara filosofis pemberdayaan juga mencakup beberapa hal (Taruna, 2001 : 112) :

1. Menolong diri sendiri (mandiri).
2. Senantiasa mencari dan menemukan solusi bersama.
3. Ada pendampingan (secara teknis maupun praktis).
4. Demokratis
5. Menyuburkan munculnya kepemimpinan lokal.

Menurut Tjandraningsih dalam (Harijani, 2001 : 24), pemberdayaan adalah suatu konsep yang lebih mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari

kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama.

Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat yang menempati suatu wilayah. Sesuai dengan pendapat Djopari & Solihah, (2008:211) mengemukakan bahwa "Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi".

Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitas dan advokasi partisipasi melalui aktifitas mobilisasi.

### **C. Aspirasi Masyarakat**

Aspirasi menurut Purwoko (2008), secara definitif mengandung dua definisi, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktual. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti jumlah / gagasan verbal dari lapisan masyarakat maupun suatu forum formalitas yang dituangkan dalam usulan pembangunan. Ditingkat peran dalam struktual, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Aspirasi selain dari masyarakat bisa juga hasil dari Reses DPRD, dengan hasil kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilahan untuk menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat. Dari hasil Reses DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terwakili oleh wakil rakyat. Hasil Reses DPRD menurut Dwiyanto dkk (2003) adalah program kegiatan yang diusulkan oleh DPRD yang akan dituangkan dalam APBD.

Proses penyerapan aspirasi masyarakat ada dua tahap yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi oleh pemerintah melalui perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD yaitu ada dua tahap secara langsung dan secara tidak langsung.

Penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung dengan dialog tatap muka, seminar dan lokakarya saat kunjungan kerja yang dilakukan DPRD pada saat Reses. Bertujuan untuk menyerpa menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Secara tidak langsung berupa konsultasi dengan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh pemerintah daerah.

Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD dalam proses penyusunan APBD dengan peninjauan lapangan dan pertemuan masyarakat menurut Dwiyanto dkk (2003), kegiatan tersebut lebih dominan dibandingkan mekanisme atau secara konvensional seperti Musrenbang, seminar dan lain-lain. Sedangkan sarana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD adalah dengan Musrenbang sebagai forum musyawarah ditingkat RT-RW , Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kota untuk menyepakati rencana kegiatan.

#### **D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut diuraikan tentang Lembaga Kemasyarakatan pada BAB VII, khususnya Pasal 11 tentang tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Adapun tugas lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;

- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah pada hal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, Musrenbang Kelurahan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.

- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Adapun beberapa fungsi dan peranan yang dapat dilihat dari sisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator sebagaimana yang dikutip dari (Minarni, 2014) dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Kelurahan memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator

Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan. LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM di Kelurahan Bonto Makkio mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga Kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh dalam proses pembangunan Kelurahan.

### 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di Desa atau Kelurahan, Kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau Kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting

dan strategis dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia.

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Ndraha (1994) mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

#### 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah

dia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Proses pemberdayaan dan pemerintahan berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

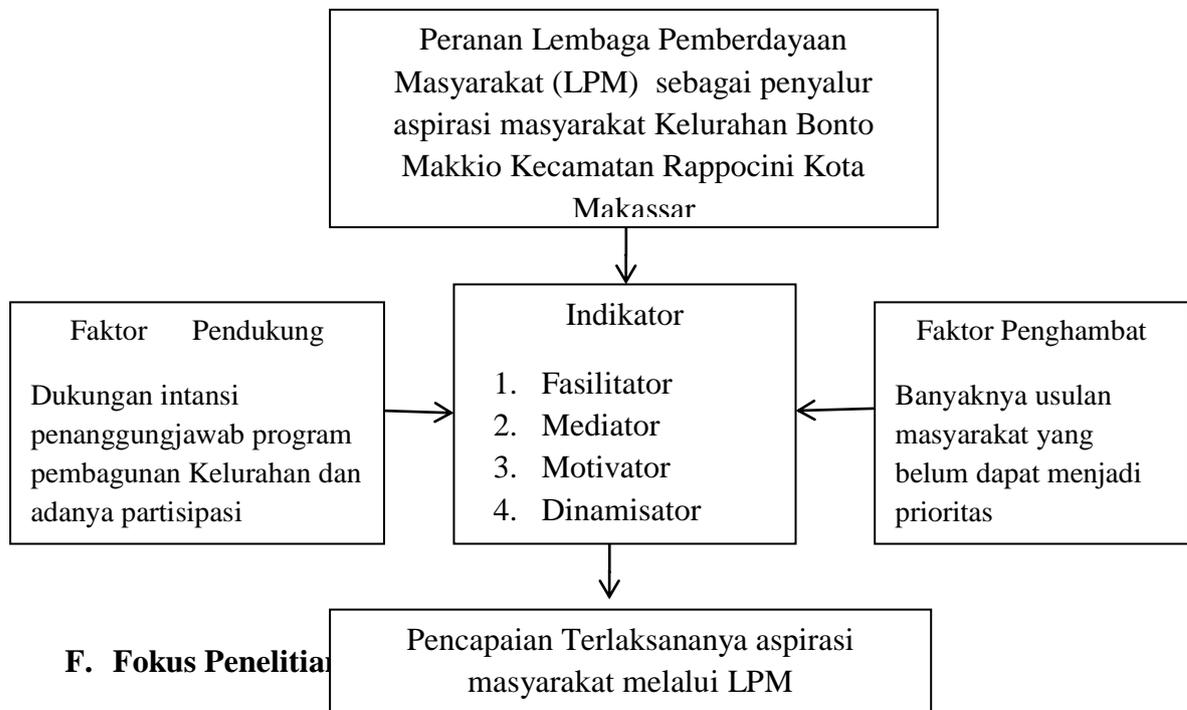
#### **E. Kerangka Pikir**

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat adalah lembaga wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat disegala aspek yang ada. Penyaluran aspirasi masyarakat melalui tahapan-tahapan sehingga aspirasi masyarakat bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat setempat dan LPM sebagai penyambung antara masyarakat dan pemerintahan.

Proses penyaluran aspirasi masyarakat melalui LPM, pertama kali melalui proses pengaduan masyarakat dengan cara musyawarah atau mufakat antara masyarakat dan LPM, kemudian LPM menampung aspirasi masyarakat dan pemecahan solusi masalah dan dilakukan pelaporan ke pemerintahan pusat sebagai alternatif pembantu pemecahan masalah apabila LPM kelurahan tidak dapat menyelesaikan keluhan masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat akan ditelusuri dengan menggunakan indikator fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran LPM dalam penyaluran aspirasi masyarakat Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berdasarkan uraian penjelasan kerangka pikir di atas maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), berperan sebagai mitra pemerintah dan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan. Selain itu LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat disegala aspek yang ada. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang disoroti meliputi : (1) Fasilitator, LPM memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (2) Mediator, mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (3) Motivator, aktifitas LPM di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam memotivasi masyarakat agar dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan yang nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Kelurahan Bonto Makkio. (4) Dinamisator, kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam

proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

#### **G. Dekripsi Fokus Penelitian**

1. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra pemerintah serta sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator adalah segala aktifitas LPM dalam mewadahi setiap kegiatan pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator yaitu perantara pemerintah dengan masyarakat yang bertugas melakukan sosialisasi dari pemerintah maupun usulan dari masyarakat.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator yaitu lembaga yang memberi dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinamisator sebagai lembaga penggerak partisipasi masyarakat tetap berlangsung dalam hal pemberdayaan dan pembangunan.
6. Faktor Pendukung yaitu segala hal yang mendukung peranan LPM sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal ini dukungan berbagai instansi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Bonto Makkio.

7. Faktor penghambat yaitu segala kendala yang muncul dari peranan LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat, kendala yang muncul yaitu Banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat menjadi prioritas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bulan April sampai Mei 2016. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena melihat masih kurang optimalnya peranan LPM dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian setelah itu dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6). Metode ini diharapkan mampu mendeskripsikan Peran LPM sebagai penyaluran aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Moleong (2012), mengartikan fenomenologi sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal dan suatu studi

tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Melalui tipe penelitian ini peneliti berusaha memahami makna dari suatu peristiwa yang saling mempengaruhi terutama yang terkait dengan peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

### C. Sumber Data

#### a. Data primer

primer adalah yang diperoleh langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

#### b. Data sekunder

sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

### D. Informan Penelitian

sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Yaitu suatu teknik penarikan informan yang digunakan apabila unsur-unsur yang ada dalam lokasi penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ditarik/ dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

man Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
----	---------------	---------	---------	--------

1.	Fandi Wiranto Ikbal	FWI	Lurah	1
2.	Ramshie	RA	Ketua LPM	1
3.	Dg. Makanang	DGM	Sekretaris LPM	1
4.	Gunawan	GN	Tokoh Masyarakat	1
5.	Ahmad Adha	AA	Tokoh Masyarakat	1
6.	Usman	US	Masyarakat Umum	1
7.	Syamsul	SY	Masyarakat Umum	1
8.	Imam Mahmud	IM	Masyarakat Umum	1
Total Informan				8

### E. Teknik Pengumpulan data

- a. **Observasi**, adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.
- b. **Wawancara**, adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan **wawancara** langsung melalui daftar pertanyaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.
- c. **Dokumentasi**, adalah mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-**dokumen** tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang di teliti.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2007) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga unsur dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data sedang berlangsung.
2. Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

#### **G. Pengabsahan Data**

Trianggulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Trianggulasi sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012).

##### **1. Trianggulasi sumber**

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

## **2. Trianggulasi metode**

Trianggulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu di uji kekuatan atau ketidak akuratannya.

## **3. Trianggulasi waktu.**

Trianggulasi waktu berkenan dengan waktu pengumpulan data yang wawancara, observasi dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

# **BAB IV**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Deskripsi dan Karakteristik Obyek Penelitian**

### **1. Gambaran Umum Kota Makassar**

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.

#### A. Visi Kota Makassar

Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni “Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat

dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : *Pertama* , yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global. *Kedua*, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai- nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu. Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut : “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”. Visi tersebut mengandung makna :

- 1) Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya;
- 2) Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar;
- 3) Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- 4) Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

#### B. Misi Kota Makassar

Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan serta peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Rappocini**

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Panakukang di Sebelah utara Kecamatan Panakukang, dan Kabupaten Gowa di sebelah timur. Kecamatan Tamalanrea di sebelah selatan dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar di sebelah barat. Kecamatan

cini merupakan merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut.

Menurut jaraknya letak masing-masing kelurahan ke kecamatan berkisar 1 km dengan jarak 5-10 km.

## 1. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Kecamatan Rappocini dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Rappocini

No	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Gunung Sari	2.13
2	Karunrung	1.52
3	Mappala	0.50
4	Kassi-Kassi	0.82
5	Bonto Makkio	0.20
6	Tidung	0.89
7	Banta-bantaeng	1.27
8	Buakana	0.77
9	Rappocini	0.36
10	Ballaparang	0.59
Total		9.23

Sumber : Kecamatan Rappocini, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 Kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km<sup>2</sup> dari luas wilayah tersebut. Dapat dilihat bahwa Kelurahan Gunung sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km<sup>2</sup>. Kemudian yang terluas kedua adalah Kelurahan Bonto Makkio yaitu 0,20 km<sup>2</sup>.

## 2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Rappocini dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Rappocini

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Gunung Sari	40.032

2	Karunrung	13.575
3	Mappala	9.375
4	Kassi-Kassi	17.758
5	Bonto Makkio	7.323
6	Tidung	15.176
7	Banta-bantaeng	22.241
8	Buakana	13.724
9	Rappocini	9.115
10	Ballaparang	12.373
Total		158.325

Sumber : Kecamatan Rappocini, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk total kecamatan Rappocini yaitu 158.325 jiwa. Angka proyeksi ini merupakan hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dapat dilihat bahwa kelurahan Gunung Sari berjumlah 40.032 merupakan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Rappocini diikuti Banta-Bantaeng di Urutan Kedua kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar yakni 22.241 jiwa. Sementara Bonto Makkio merupakan kelurahan dengan jumlah paling sedikit di Kecamatan Rappocini dengan jumlah 7.323 jiwa.

### 3. Pendidikan dan Kesehatan

Adapun tingkat pendidikan TK terdapat sebanyak 29 sekolah dengan 577 orang tua murid dan 105 orang guru. Untuk tingkat SD Inpres sebanyak 24 sekolah dengan 8.049 orang murid dan 173 guru, SD Neferi sebanyak 15 sekolah dnegan 4.006 orang murid dan 140 orang guru, SD swasta sebanyak 9 sekolah dengan 1.412 orang murid dan 78 orang guru. Untuk tingkat SMP Negeri sebanyak 4 sekolah dengan 2.887 orang murid dan 201 orang guru, untuk SMP swasta sebanyak 15 sekolah dengan 1.961 orang murid dan guru sebanyak 205 orang.

Adapun tingkat SMA negeri sebanyak 1 sekolah dengan 674 orang murid dan 72 orang guru. Untuk SMA swasta sebanyak 10 sekolah dengan 952 orang murid dan 181 orang guru. Sedangkan untuk SMK Negeri sebanyak 1 sekolah dengan 600 orang murid dan 72 orang guru. Untuk SMK swasta sebanyak 9 sekolah dengan jumlah 3517 orang murid dan 352 orang guru.

Selain itu terdapat pula sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Agama, yaitu Raudhatul Atfal. Sedangkan untuk Madrasah Ibtidayah Negeri sebanyak 1 sekolah dengan 525 orang murid dan 26 orang guru, dan Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 1 sekolah, dengan jumlah murid 375 orang dan 49 orang guru. Selanjutnya jumlah sarana (fasilitas) kesehatan di Kecamatan Rappocini tercatat terdapat 2 rumah sakit umum, 4 puskesmas, 4 pusku, 4 rumah bersalin, dan 97 posyandu yang berada di Kecamatan Rappocini.

#### 4. Sosial Kemasyarakatan

Mayoritas penduduk di Kecamatan Rappocini beragama islam dengan jumlah jumlah tempat ibadah yang dinilai cukup memadai diantaranya 121 buah mesjid dan 10 buah gereja terdapat di Kecamatan Rappocini. Adapun untuk perdagangan terdapat 24 buah kelompok pertokoan dan 7 SPBU. Sementara itu lembaga dan organisasi tingkat kelurahan yang terbentuk di Kecamatan Rappocini dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Rappocini terdapat masing 1 ditiap-tiap kelurahan.

### 3. Profil Kelurahan Bonto Makkio

Kelurahan Bonto Makkio merupakan salah satu diantara 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan luas wilayah 24 Km. Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Bonto Makkio dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Penduduk Kelurahan Bonto Makkio

No	Deskripsi	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	7323 Jiwa
2	Laki-laki	3663 Jiwa
3	Perempuan	3660 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	961 KK
5	Jumlah KK Prasejahtera	157 KK
6	Jumlah RW	6 ORW
7	Jumlah RT	26 ORT

Sumber : Kelurahan Bonto Makkio, 2016

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan di Kelurahan Bonto Makkio yaitu 7323 jiwa yang terbagi atas 3663 jiwa laki-laki dan 3660 jiwa perempuan yang tersebar dalam 961 KK, dan dari keseluruhan Kepala Keluarga tersebut terdapat Prasejahtera sejumlah 157 KK yang berada dalam 6 ORW dan 26 ORT di Kelurahan Bonto Makkio. Adapun sarana Prasarana kelurahan Bonto Makkio dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Sarana Prasarana Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Bonto Makkio

No	Deskripsi	Jumlah
1	Poskamling	6 unit
2	Posyandu	6 unit

3	TK/Play Group	3 Unit
4	SD Negeri/swasta	5 Sekolah
5	SMP	1 Sekolah
6	SMA/SMK	2 Sekolah
7	Kejar Paket	A-B-C-KF-Paud
8	Taman Baca	1 (TB. Handayani)
9	Rumah/Ruko	836 Unit
10	Mesjid	4 unit
11	Musallah	1 unit
12	Gereja	1 unit

Sumber : Kelurahan Bonto Makkio, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beragam sarana prasana social kemasyarakatan di Kelurahan Bonto Makkio yang dapat ditemui diantaranya terdapat 4 unit mesjid, 1 mushallah, dan 1 gereja. Untuk fasilitas kesehatan ada 6 unit posyandu, untuk keamanan ada juga 6 unit poskamling serta sarana prasarana pendidikan berupa 3 unit play group, 5 SD, 1 SMP, dan 2 SMA/SMK.

## **B. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.**

Untuk memberikan gambaran mengenai peranan LPM di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini Kota Makassar maka akan diuraikan melalui sejumlah indikator yaitu fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator yang didalam penjelasannya memiliki keterkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

### **1. Fasilitator**

Fasilitator dalam penelitian ini diartikan sebagai wadah yang bertujuan memfasilitasi segala aktivitas masyarakat terkait program pembangunan yang direncanakan kemudian dilaksanakan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Keberadaan LPM sendiri menjadi sebuah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan hal ini sejalan dengan kutipan wawancara dengan Ketua LPM Kelurahan Bonto Makkio yang mengemukakan bahwa:

“Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) itu sendiri sebenarnya merupakan wujud sebuah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dan kelurahan dalam menampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan”

(Hasil wawancara RA, tanggal 10 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa LPM merupakan wadah yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat yang berdasar pada kebutuhan masyarakat dibidang pembagunan. Melalui gambaran tersebut dapat kita telusuri tentang keberdaaan LPM sebagai fasilitator dalam agenda pembangunan dalam lingkup kelurahan.

Secara lebih spesifik LPM menjadi yang memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang dan program pembangunan hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan Sekretaris LPM yang mengemukakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) itu memfasilitasi segala bidang yang bersentuhan dengan pembangunan baik itu pendidikan, kesehatan, maupun kesejahtraan sosial kami disini mendorong agar terus ada keterlibatan dari warga agar senantiasa mengawasi jalanya pembagunan”

(Hasil wawancara dengan DGM, tanggal 12 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa LPM memfasilitasi pembangunan yang ada di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini yang meliputi berbagai bidang pembangunan diantaranya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. LPM memfasilitasi setiap kegiatan yang terkait dengan program pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini.

Adapun kegiatan Pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 6. Kegiatan Program Pembangunan Kelurahan Bonto Makkio

Program Utama	Sub Program Kegiatan	Lokasi/tempat
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pembangunan sekolah BKB (Bina Keluarga Balita)	Jl. Tidung III RW 03
	Penimbunan Paving Blok Lapangan upacara SD Inpres	SD Inpres Perumnas I, II, dan IV Jl. Bonto Dg. Ngirate
Peningkatan Derajat Kesehatan	Musim Panca roba (pengadaan penyemrotan fogging)	RW 01, 02, 03,04, 05, 06
	Pembagian Abate tiap KK	RW 01, 02, 03,04, 05, 06
	Perbaikan sarana posyandu	RW 01, 02, 03,04, 05
	Kelengkapan sarana posyandu	RW 4 Jl. Tidung V
Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan agama	Program Kesejahteraan sosial (Penyuluhan Narkoba dan pelatihan Karang taruna)	Aula Kantor lurah bonto makkio
	Program budaya dan agama (pengadaan Al Quran, pelatihan memandikan jenazah, dan	Untuk 5 Mesjid di Kel. Bonto Makkio

	peringatan hari besar islam)	
Pembangunan wawasan tata ruang dan lingkungan	Program pembangunan jalan dan jembatan (pembangunan jalan setapak, perbaikan got dan selokan, pengaspalan jalan/paving blok.	Jl. Hertasning Barat, RT.002/RW.01, jl. Tidung I dan jl. Tidung II
	Pemasangan Paving Blok	Jl. Tidung I stp 3 RW 2, Jl. Tidung II stp3 RW 2, Jl. Tidung III stp. 1 RW 3, Jl. Tidung III stp 9 RW 4, Jl. Tidung III stp 1 RW 4, Jl. Bonto dg Irate stp. 5,6, dan3 RW 6
	Program Pembangunan (saluran drainase, perbaikan jembatan, dan rehabilitasi pemeliharaan jalan)	Jembatan/gorong-gorong jl. Bonto Dg. Irate batas RW. 2 dan RW. 3
	Pengadaan/pemasangan lampu jalan	Lapangan OR Emmy Saelan RW 2, Jl. Bonto Dg. Irate II Pasar Darurat. Jl. Tidung III Barat batas kelurahan tidung, Jl. Tidung V batas kelurahan tidung, jl. Bonto dg Irate.
	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	jl. Tamalate.
Pengelolaan Lingkungan hidup	Program ruang terbuka hijau	Penghijuan Jl. Tamalate I lapangan OR Emmy saelan
Pembangunan Politik dan HAM	Program pembinaan kehidupan politik dan demokrasi, Rehab Pos Polisi, Biaya Operasional FKPM	Jl. Tamalate I RW 4, Balai Pertemuan LPM, Jl. Bonto Dg Irate.
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Gender serta Pemberdayaan Masyarakat	Lapangan Olahraga	RW 6

Sumber : Kelurahan Bonto Makkio, 2016

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan agenda pembangunan seperti ; Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pembangunan Politik dan HAM, Pengelolaan Lingkungan hidup, Pembangunan wawasan tata ruang dan lingkungan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan agama, dan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Gender serta Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai peran LPM dalam pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio khususnya terkait fungsinya sebagai fasilitator dalam hal penyalur aspirasi masyarakat maka dapat dicermati melalui kutipan wawancara dengan Lurah Bonto Makkio yang mengatakan :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) disini memfasilitasi setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat apa yang kita rasa dibutuhkan oleh masyarakat itu yang kita wadahi seperti di kelurahan ini butuh pembangunan perbaikan drainase, ada masalah kebersihan, masalah keamanan serta pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan dan kita juga membantu mensosialisasi program Pemkot Makassar tidak rantasa”

(Hasil wawancara FWI, 12 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat mewadahi atau memfasilitasi setiap kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat Kelurahan Bonto Makkio seperti masalah kebersihan dan keamanan serta masalah terkait pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan.

Untuk memperoleh gambaran tentang peran tersebut maka perlu uraian dari sudut pandang tokoh masyarakat untuk mencermati keberadaan LPM dalam

memfasilitasi atau mewadahi aspirasi masyarakat. Adapun pandangan dari tokoh masyarakat dikemukakan oleh GN selaku tokoh yang telah lama dikenal di Kelurahan Bonto Makkio mengatakan bahwa :

“Keberadaan LPM itu meberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan contohnya dalam musrembang LPM menjadi lembaga yang membantu mengartikulasikan kepentingan masyarakat baik itu persoalan pembangunan fisik maupun masalah SDMnya, lebih banyak masalah fisik pembangunan yang singgung”  
(Hasil wawancara GN, Tanggal 21 Mei 2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tokoh masyarakat lain di Kelurahan Bonto Makkio AA mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) banyak membantu masyarakat dalam pembangunan karena LPM ini aktif dalam musrembang dan disitu akan dibahas perencanaan pembangunan yang akan diusulkan ke tingkat Kota LPM memiliki peran penting disitu”  
( Hasil wawancara AA, Tanggal 12 Mei 2016)

Lebih lanjut Pandangan dari Beberapa masyarakat mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda, seperti yang dikemukakan US sebagai masyarakat Kelurahan Bonto Makkio mengatakan bahwa :

“Saya kira LPM disini diisi oleh orang-orang yang memiliki dedikasi pada masyarakat Kelurahan Bonto Makkio mereka sudah paham betul tentang perannya sebagai agen pemberdayaan bagi masyarakat disini terlebih soal pembagunan yang penting bagi masyarakat”  
(Hasil wawancara US, Tanggal 18 Mei 2016)

Kemudian pandangan dari masyarakat lainnya yaitu SY yang mengatakan bahwa :

“Secara kelembagaan LPM merupakan lembaga yang mewadahi kepentingan masyarakat sehingga wajar saja kalau dikatakan LPM itu sebagai fasilitator bagi kepentingan masyarakat”  
(Hasil wawancara SY, Tanggal 12 Mei 2016)

Selanjutnya IM sebagai masyarakat umum di Kelurahan Bonto Makkio juga memberikan pandangannya, beliau mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) disini sangat tepat kalau dikatakan sebagai wadah yang memfasilitasi kebutuhan warga entah itu pembangunan atau masalah social yang terjadi sehingga dapat ditemukan solusinya”

(Hasil wawancara IM, Tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keberadaan LPM mewadahi kepentingan masyarakat dan memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan kepentingan tersebut karena LPM merupakan wadah yang dekat dengan kepentingan masyarakat dan mengenal persoalan yang terjadi hal ini tergambar dari keaktifan LPM dalam Musrembang dengan menyampaikan usulan dari masyarakat berupa kebutuhan maupun persoalan yang ada di Kelurahan Botto Makkio secara umum usulan yang banyak disampaikan terkait dengan pembangunan fisik.

## **2. Mediator**

Peran LPM sebagai mediator dalam pembangunan yakni mempunyai tugas mensosialisasikan hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Dalam memberikan gambaran mengenai peran mediator tersebut maka perlu diberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang dimediasi oleh LPM yang tertuang dalam usulan dan sasaran program yang melibatkan unsur-unsur terkait. Hal ini dapat ditelusuri dari tabel berikut :

Tabel 7. Unsur-Unsur Terkait Dalam Program Pembangunan Kelurahan Bonto Makkio

Program Utama	Sasaran/manfaat	Penanggung jawab
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Membantu pemerintah di bidang pendidikan	Dinas Pendidikan
Peningkatan Derajat Kesehatan	Mencegah penyakit menular, bantuan kesehatan, menambah semangat kerja kader posyandu	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan agama	Mencegah Penyalahgunaan NAFSA, menambah pengetahuan remaja, mengurangi buta aksara Al Quran memperdalam iman & taqwa kepada Allah SWT	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Departemen Agama
Pembangunan wawasan tata ruang dan lingkungan	Menanggulangi Banjir, memperluas arus lalu lintas, penerangan untuk menanggulangi kenakalan remaja	Dinas PU
Pengelolaan Lingkungan hidup,	Lahan terbuka hijau	Dinas PLH
Pembangunan Politik dan HAM	Membantu tugas kepolisian menanggulangi gangguan Kantibnas	POLRI
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Gender serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan prestasi remaja	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : Kelurahan Bonto Makkio, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah instansi yang bertanggung jawab dalam sejumlah kegiatan diantaranya Dinas Pendidikan

memiliki sasaran program yaitu membantu pemerintah di bidang pendidikan, Dinas Kesehatan memiliki sasaran program yakni mencegah penyakit menular, bantuan kesehatan, menambah semangat kerja kader posyandu. Dinas PU memiliki sasaran program yaitu menanggulangi Banjir, memperluas arus lalu lintas, penerangan untuk menanggulangi kenakalan remaja. POLRI memiliki sasaran program yaitu membantu tugas kepolisian menanggulangi gangguan Kantibnas dan Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran program yaitu meningkatkan prestasi remaja.

Untuk memberikan gambaran dari peran Mediator LPM melalui sejumlah program pembangunan diatas dapat telusuri melalui hasil wawancara dengan Ketua LPM, RA yang mengatakan bahwa:

“Usulan masyarakat dari RT/TW disampaikan kepada LPM yang kemudian ditindak lanjuti di pemerintah kota setelah melalui musrembang setelah usulan tersebut dilaksanakan maka LPM bersama dengan kelurahan berkerjasama untuk menyukseskan program yang akan dilaksanakan”  
(Hasil wawancara RA tanggal 15 Mei 2016)

Hasil wawancara lebih lanjut mengenai peran Mediator tersebut diungkapkan oleh Lurah Bonto Makkio FWI, yang mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) disini menjadi perantara ke Pemerintah Kota agar kepentingan masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah melalui sejumlah program yang relevan terhadap pembangunan”  
(Hasil wawancara RA tanggal 29 April 2016)

Kemudian Sekrertaris LPM menambahkan penjelasan yang mengungkapkan bahwa :

“Musrenbang menjadi contoh suatu peran yang sangat penting dari LPM jika kita melihatnya dari kacamata mediator karena disitulah LPM menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat melalui musyawarah”  
(Hasil wawancara RA tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa usulan masyarakat dari RT/RW disampaikan kepada LPM yang kemudian menjadi usulan yang tindak lanjuti pemerintah kota setelah melalui musrembang sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk program yang melibatkan berbagai unsur instansi.

Adapun pandangan dari Tokoh masyarakat mengenai peran LPM sebagai Mediator dapat diuraikan melalui serangkaian wawancara dengan tokoh masyarakat, salah satunya GN yang mengatakan bahwa :

“Sejumlah program pemerintah tentu melibatkan LPM dan instansi terkait seperti dinas kebersihan melalui program lorong garden dan Makassar tidak rantasa memberikan kontribusi bagi masyarakat”  
(Hasil wawancara dengan GN, tanggal 29 April 2016)

Selanjutnya hasil wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya yaitu AA mengatakan bahwa:

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi penyambung antara keinginan masyarakat yang ada kepada pemerintah kota seperti banyak terjadi kerusakan jalan, masalah kesehatan seperti bahaya demam berdarah dan narkoba maupun program pemerintah kota seperti Makassar tidak rantasa LPM mensosialisasikan hal itu”  
(Hasil wawancara AA tanggal, 13 Mei 2016)

Lebih lanjut US sebagai masyarakat Kelurahan Bonto Makkio Mengemukakan bahwa :

“Masalah pembangunan tentu menjadi peran pemerintah bukan cuma LPM saja tetapi disitu kita bisa lihat perannya LPM bahwa mereka sebagai penyalur aspirasi dan kita juga sebagai masyarakat sangat terbuka akan keberadaan LPM ini”  
(Hasil wawancara AA tanggal, 18 Mei 2016)

Pandangan yang sejalan juga dikemukakan SY sebagai masyarakat umum di Kelurahan Bonto Makkio mengatakan bahwa :

“Saya rasa dengan adanya LPM ini segala keperluan masyarakat dapat disampaikan tanpa ada yang namanya keraguan karena semua sudah serba terbuka, contoh masalah persampahan sekarang sudah ada program pemerintah Makassar tidak rantasa”  
(Hasil wawancara AA tanggal, 18 Mei 2016)

Selanjutnya pandangan dari masyarakat memberikan pandangan tentang keberadaan LPM yakni IM masyarakat Kelurahan Rappocini mengatakan :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membantu mensosialisasikan program pemerintah seperti permasalahan persampahan, retribusi sampah, dan lorong Garden yang melibatkan masyarakat”  
(Hasil wawancara IM tanggal, 12 Mei 2016)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran LPM sebagai mediator yakni meyabungkan keinginan masyarakat terkait permasalahan pembangunan dan masalah sosial selain itu LPM juga aktif dalam mensosialisasikan beberapa program pemerintah kota seperti Makassar tidak rantasa dan lorong garden yang melibatkan masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio.

### **3. Motivator**

Peran LPM sebagai motivator yakni aktifitas LPM di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam memotivasi masyarakat agar dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan yang nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar Kelurahan Bonto Makkio.

Untuk memberikan gambaran tentang peran LPM sebagai motivator dapat ditelusuri dari hasil wawancara dengan Lurah Bonto Makkio yang memberikan penjelasan tentang peran LPM sebagai motivator, beliau mengemukakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrembang dimana didalamnya disampaikan tentang isu-isu yang sifatnya strategis yang penting dan memang memiliki sesuai bagi kebutuhan masyarakat, yang diharapkan nantinya dapat disampaikan ke pemerintah kota agar menjadi program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat”  
(Hasil wawancara dengan FWI, 10 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran peran LPM sebagai motivator yaitu memberikan dorongan kepada masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrembang yang banyak mengulas tentang isu-isu strategis pembangunan yang bersifat penting dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut menegani peran LPM sebagai motivator disampaikan oleh Ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat perlu terlibat dalam kegiatan pembangunan terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, adapun prosesnya dimulai dari musrenbang agar diperoleh beberapa isu yang penting bagi kebutuhan masyarakat”  
(Hasil wawancara dengan RA, 28 April 2016)

Kemudian hal yang senada disampaikan Sekretaris LPM yang mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan salah satu caranya yaitu mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program pemerintah kota di kelurahan ini”  
(Hasil wawancara dengan DMG, 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keberadaan LPM memberikan dorongan tersendiri kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan program Pemerintah Kota yang dilakukakan di Kelurahan Bonto Makkio Kota Makassar.

Selain penjelasan tentang peran LPM sebagai motivator yang digambarkan oleh Lurah dan pengurus LPM, juga dibutuhkan pandangan dari masyarakat yang menilai peran LPM itu sebagai motivator. Untuk maka dilakukan penelusuran wawancara dengan informan US yang mengemukakan bahwa :

“Biasa LPM mengundang kami untuk ikut diberbagai kegiatan yang diadakan seperti lorong garden, kadang juga ada kegiatan kerja bakti jadi kami ikut terlibat anak muda dan orang tua juga ada”  
(Hasil wawancara dengan US, tanggal 11 Mei 2016)

Selain itu Tokoh masyarakat AA sebagai informan yang telah lama berada di Kelurahan Botto Makkio mengatakan bahwa :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membantu banyak saya rasa dalam sosialisasi pemerintah kota tentang program yang dicanangkan kepada masyarakat, dengan pelibatan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, peyuluhan, sosialisasi akan sangat bermanfaat”  
(Hasil wawancara dengan AA, tanggal 21 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan LPM memberikan dorongan kepada masyarakat untuk aktif dalam sejumlah program. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Bonto Makkio GN yang mengatakan:

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memberikan dorongan bagi masyarakat agar peduli dan tetap peka terhadap kebutuhan masyarakat disinilah perlu LPM menjadi penyalur aspirasi masyarakat”  
(Hasil wawancara dengan GN, tanggal 21 Mei 2016)

Penjelasan lebih lanjut ditambahkan IM sebagai masyarakat umum yang mengatakan :

“Selain mengundang dalam acara musyawarah kami juga dilibatkan dalam berbagai program seperti sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kami rasa berguna bagi masyarakat”  
(Hasil wawancara tanggal 18 Mei 2016)

Selain itu SY informan lain dari masyarakat sekitar Kelurahan Botto Makkio mengemukakan :

“Kalau ada penyuluhan biasa kami diundang untuk hadir LPM disini saya rasa cukup aktif bersosialisasi tentang sosialisasi program Makassar tidak rantasa juga pernah dilakukan”  
(Hasil wawancara dengan SY, tanggal 11 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran LPM sebagai motivator tergambar dalam peran aktif dalam sosialisasi berbagai program dan kegiatan pemerintah serta dorongan untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai program pemerintah kota tersebut seperti makassar tidak rantasa, lorong Garden, kerja bakti, pelatihan dan sosialisasi yang di adakan di Kelurahan Bonto Makkio.

#### **4. Dinamisator**

Peranan LPM sebagai Dinamisator diartikan berupa kegiatan LPM di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Dinamika yang terjadi dalam keberadaan LPM ini tergambar dari setiap tindak lanjut permasalahan atau usulan yang merupakan aspirasi masyarakat

diakomodir pemerintah kota. Untuk memperoleh penjelasan mengenai dinamika tersebut maka dapat diuraikan dari hasil wawancara yang dikemukakan Luruh Rappocini yang mengatakan bahwa :

“Jika kita dalam wilayah Rappocini memerlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka warga bersama LPM akan meberikan usulan kegiatan, jika hal tersebut sudah disetujui dan dianggarkan maka LPM bersama masyarakat akan berperan aktif dalam program itu”  
(Hasil wawancara FWI, tanggal 12 Mei 2016)

Selanjutnya penjelasan senada diberikan Sekretaris LPM, yang mengatakan:

“Menjadi penting ketika masyarakat membutuhkan sebuah wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam hal pembangunan disitulah LPM menjadi dinamisator dalam artian sebagai penggerak kepentingan masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota misalnya ada permasalahan kesejahteraan masyarakat maka akan diajukan usulan ke pemerintah”  
(Hasil wawancara DMG, tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa permasalahan yang ditemui ditengah masyarakat khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan diajukan usulan kegiatan dan setelah disetujui dan dianggarkan maka LPM dan masyarakat akan berperan aktif dalam program tersebut. Selain itu Dinamika lain yang dimotori LPM dapat diuraikan melalui kutipan wawancara dengan Ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Permasalahan tentang hukum yang ada dalam masyarakat misalnya perkelahian antar warga sering terjadi sehingga pernah ada sosialisasi tentang hukum dan MTR yang LPM wadahi agar membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan hukum serta keamanan dan keharmonisan warga kami kapolsek dan sekertaris camat sebagai narasumber waktu itu”  
(Hasil wawancara RA, tanggal 20 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa Peran LPM sebagai dinamisator menunjukkan permasalahan yang ada dalam

masyarakat akan dicarikan solusi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Sebagai contoh yang dilakukan adalah sosialisasi tentang hukum dan MTR yang bertujuan untuk keamanan dan keharmonisan warga agar pertikaian antar warga dapat senantiasa dibatasi. Selanjutnya pandangan masyarakat yang dapat ditelusuri dalam penelitian ini mengemukakan sejumlah pendapat mengenai peran LPM sebagai dinamisor, salah satunya tokoh masyarakat AA yang mengatakan bahwa:

“Sejumlah sosialisasi yang melibatkan masyarakat merupakan kegiatan yang positif hal ini memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial masyarakat di sini”  
(Hasil wawancara AA, tanggal 18 Mei 2016)

Hal yang senada dikemukakan tokoh masyarakat lainnya yaitu GN yang mengemukakan bahwa:

“Program pemerintah membutuhkan lembaga yang ada dalam kelurahan salah satunya itu LPM ini keterlibatan mereka dibutuhkan untuk mendorong masyarakat lebih aktif”  
(Hasil wawancara GN, tanggal 20 Mei 2016)

Selain pandangan dari tokoh masyarakat juga dipaparkan beberapa pandangan masyarakat umum yang salah satunya dikemukakan oleh IM yang mengatakan bahwa :

“Permasalahan seperti pembangunan dalam bidang pendidikan atau kesehatan perlu ada yang tau persis perkembangannya LPM menjadi pemerhati permasalahan tersebut”  
(Hasil wawancara IM, tanggal 18 Mei 2016)

Hal yang senada dikemukakan masyarakat umum lainnya yaitu US yang mengatakan bahwa:

“Problem yang ada tentu punya solusinya namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri perlu dukungan dari masyarakat seperti masalah keamanan dan ketertiban masyarakat”  
(Hasil wawancara IM, tanggal 12 Mei 2016)

Secara lebih rinci SY mengemukakan solusi dari permasalahan yang ada, beliau mengatakan bahwa:

“Masalah keamanan dan ketertiban contohnya pernah dilakukan sosialisasi hukum dan MTR untuk membatasi terjadinya perkelahian antar warga dan masalah keamanan dan ketertiban lainnya yang terjadi ditengah masyarakat”

(Hasil wawancara SY, tanggal 20 Mei 2016)

Berdasarkan beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dapat dicarikan solusinya salah satu contoh yang dikemukakan adalah sosialisasi hukum dan MTR yang tentu melibatkan masyarakat dan LPM sebagai penggerak didalamnya agar persoalan seperti keamanan dan ketertiban dapat dibatasi.

Serangkaian hasil penelitian dan penjelasan tentang peran LPM yang ditinjau sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat mewedahi atau memfasilitasi setiap kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat Kelurahan Bonto Makkio seperti masalah kebersihan dan keamanan serta masalah terkait pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. keberadaan LPM mewedahi kepentingan masyarakat dan memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan kepentingan tersebut karena LPM merupakan wadah yang dekat dengan kepentingan masyarakat dan mengenal persoalan yang terjadi hal ini tergambar dari keaktifan LPM dalam Musrembang dengan menyampaikan usulan dari masyarakat berupa kebutuhan maupun persoalan yang ada di Kelurahan Botto Makkio.

Kemudian keberadaan LPM yang memiliki peran sebagai mediator yakni menyambungkan keinginan masyarakat terkait permasalahan yang ada dan aktif dalam mensosialisasikan beberapa program pemerintah kota seperti Makassar tidak rantasa dan lorong garden yang melibatkan masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio. Selain itu usulan masyarakat dari RT/RW disampaikan kepada LPM yang kemudian menjadi usulan yang tindak lanjuti pemerintah kota setelah melalui musrembang sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk program yang melibatkan berbagai unsur instansi.

Selanjutnya keberadaan LPM yang berperan sebagai motivator tergambar dalam peran aktif dalam sosialisasi berbagai program dan kegiatan pemerintah serta dorongan untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai program pemerintah kota tersebut seperti makassar tidak rantasa, lorong Garden, kerja bakti, pelatihan dan sosialisasi yang di adakan di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Kemudian keberadaan LPM sebagai Dinamisator terwujud dari adanya permasalahan yang ditemui ditengah masyarakat khusus terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan diajukan usulan kegiatan dan setelah disetujui dan dianggarkan maka LPM dan masyarakat akan berperan aktif dalam program tersebut. Sebagai contoh yang dilakukan adalah sosialisasi tentang hukum dan MTR yang bertujuan untuk keamanan dan keharmonisan warga agar pertikaian antar warga dapat senantiasa dibatasi. Hal ini merupakan kegiatan yang lahir dari permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga keberadaan LPM dan bantuan beberapa unsur terkait memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

**E. Faktor-faktor pendukung dan Penghambat Peran LPM sebagai Penyalur aspirasi Masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.**

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran LPM Penyalur aspirasi Masyarakat secara garis besar dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

**1. Faktor Pendukung**

Penelitian ini menguraikan faktor pendukung yang mempengaruhi peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang dapat diartikan bahwa segala hal yang mendukung peranan LPM sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang muncul dalam penelitian ini adalah faktor pendukung.

Guna memberikan gambaran terhadap faktor pendukung ini maka perlu dicermati dari sejumlah hal yaitu adanya dukungan dari sejumlah instansi dan adanya anggaran yang disiap untuk sejumlah program yang dicanangkan. Untuk lebih jelasnya dapat ditelusuri melalui tabel yang disajikan berikut.

Tabel. 8. Anggaran Pembangunan dan instansi terkait (Penanggungjawab Program) pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio

Instansi Terkait (penanggung jawab program)	Program Utama	Sasaran/manfaat	Biaya (Rp)
Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Membantu pemerintah di bidang pendidikan	145.000.000
Dinas Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan	Mencegah penyakit menular, bantuan kesehatan, menambah semangat kerja kader	162.240.000

		posyandu	
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Departemen Agama	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan agama	Mencegah Penyalahgunaan NAFSA, menambah pengetahuan remaja, mengurangi buta aksara Al Quran memperdalam iman & taqwa kepada Allah SWT	12.500.000
Dinas PU dan Dinas Perhubungan	Pembangunan wawasan tata ruang dan lingkungan	Menanggulangi Banjir, memperluas arus lalu lintas, penerangan untuk menanggulangi kenakalan remaja	451.000.000
Dinas PLH	Pengelolaan Lingkungan hidup,	Lahan terbuka hijau	-
POLRI	Pembangunan Politik dan HAM	Membantu tugas kepolisian menanggulangi gangguan Kantibnas	114.000.000
Dinas Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Gender serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan prestasi remaja	10.000.000

Sumber : LPM Kelurahan Bonto Makkio, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah instansi yang menjadi penanggung jawab program pembangunan ditambah dengan jumlah anggaran yang disiapkan terkait program pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio tersebut hal ini yang menjadi faktor pendukung LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan aspirasi yang disalurkan melalui LPM mendapat dukungan dari semua pihak.

Hal ini juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Lurah Bonto Makkio, FWI yang mengatakan:

“Soal anggaran dan kapasitas tentu pemerintah kelurahan tidak dapat mengerjakan sejumlah program pemerintah sendiri tetapi perlu ada kolaborasi dengan instansi lainnya seperti PU, dinas kesehatan, dinas sosial dan instansi lainnya termasuk juga lembaga lainnya seperti LPM dibutuhkan kerjasamanya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya anggaran dan dukungan instansi lainnya menjadi faktor pendukung LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat karena dengan adanya anggaran yang jelas dan keberadaan instansi lainnya maka aspirasi masyarakat akan pembangunan kelurahan Bonto Makkio menjadi lebih jelas arahnya.

Adapun faktor pendukung yang lain dari peran LPM sebagai penyalur aspirasi yaitu partisipasi dari warga dalam menyampaikan usulan atau permasalahan yang ada dikelurahan Bonto Makkio. Hal ini dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan informan Ketua LPM yang mengatakan :

“Kalau kita lihat partisipasi masyarakat cukup aktif menyampaikan usulan dan persoalan yang dirasakan baik itu tentang masalah kemasyarakatan seperti pendidikan kesehatan dan sarana prasarana pendukung kehidupan masyarakat di Sekitar kita”

(Hasil wawancara dengan RA, tanggal 20 Mei 2016)

Hal yang senada dikemukakan Sekretaris LPM yang mengatakan bahwa:

“Kalau partisipasi masyarakat disini cukup aktif dan kami antusias karena masyarakat menyampaikan pendapat dan usulan pada saat diadakannya musyawarah atau akan ada kegiatan yang dipersiapkan”

(Hasil wawancara dengan RA, tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan maupun menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Bonto Makkio merupakan faktor pendukung peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Adapun komentar masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan yang dimotori LPM bervariasi diantaranya informan AA yang mengatakan :

“Kami menganggap bahwa persoalan pembangunan bukan hanya segelintir orang dalam pemerintahan tetapi perlu melibatkan masyarakat dalam memberikan solusi atau usulan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”

(Hasil wawancara dengan AA, tanggal 18 Mei 2016)

Kemudian hasil wawancara informan lain yaitu IM mengatakan bahwa :

“Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan memang lebih banyak yang orang tua tapi saya lihat ada juga anak muda yang berpartisipasi dalam kegiatan contoh lorong garden ada juga anak yang bertugas mencat-cat tembok”

(Hasil wawancara dengan IM, tanggal 18 Mei 2016)

Namun hal berbeda dikemukakan informan SY yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat yang terlibat dari dulu itu-itulah saja ada juga pendatang tapi mereka seperti kurang memiliki respon tentang apa yang terjadi di Kelurahan ini”

(Hasil wawancara dengan SY, tanggal 13 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan di Kelurahan Bonto Makkio yang dimotori LPM namun ada juga beberapa masyarakat pendatang yang kurang berpartisipasi. Namun secara keseluruhan partisipasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio cukup baik, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan GN yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat cukup aktif terlibat dalam agenda kegiatan kelurahan begitu pula kalau ada sosialisasi banyak yang terlibat, di Kelurahan kita termasuk cukup aktif apalagi pada saat menjelang 17an”

(Hasil wawancara dengan GN, tanggal 29 April 2016)

Pendapat yang sama juga dikemukakan informan US sebagai masyarakat umum yang mengatakan bahwa:

“Kami diundang kalau ada kegiatan di Kelurahan, LPM disini cukup banyak mendorong masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun musyawarah”

(Hasil wawancara dengan US, tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan serangkaian hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa adanya partisipasi masyarakat yang cukup aktif menjadi faktor pendukung peran LPM karena tanpa partisipasi masyarakat dalam segala aktifitas LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio maka hal tersebut hanya sebatas wacana sehingga penting untuk tetap mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap agenda kelurahan dan LPM di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam penelitian ini faktor penghambat adalah sebagai segala kendala yang muncul dari peranan LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Hal yang menjadi kendala dalam setiap penyalur aspirasi masyarakat terlalu banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari hasil wawancara informan AA selaku tokoh masyarakat dan pemerhati kelurahan Bonto Makkio yang mengatakan bahwa:

“Banyak usulan yang diberikan oleh masyarakat dan semuanya usulan tersebut baik namun tidak dapat ditampung semua dan dijadikan program yang diprioritas tentu harus diperhatikan juga yang mana mendesak dan yang belum terlalu urgen begitu”

(Hasil wawancara dengan AA, tanggal 11 Mei 2016)

Hal yang senada dikemukakan Lurah Bonto Makkio FWI yang mengatakan bahwa :

“Banyak masukan dari masyarakat namun tidak semua usulan yang disampaikan dapat dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan karena kita perlu lihat dulu yang mana memiliki urgensi dan program yang menjadi prioritas”

(Hasil wawancara dengan FWI, tanggal 18 Mei 2016)

Penjelasan yang senada dikemukakan Ketua LPM yang mengatakan

bahwa :

“Masyarakat memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah namun semua lebih banyak pada porsi pembangunan jadi beberapa usulan yang kurang dianggap memiliki urgensi dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini menjadi usulan yang kurang mendapat tindak lanjut oleh pemerintah”

(Hasil wawancara dengan RA, tanggal 13 Mei 2016)

Ulasan lebih detail dikemukakan oleh Sekretaris LPM, yang

mengungkapkan bahwa :

“Beberapa penimbunan, dan perbaikan jalan belum sepenuhnya rampung sementara masih ada usulan lainnya seperti rehabilitasi gorong-gorong dan sehingga perlu ada yang diprioritaskan terlebih dahulu tidak semua usulan seketika dapat dipenuhi”

(Hasil wawancara dengan DGM, tanggal 13 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui banyak usulan yang masuk terkait dengan usulan masyarakat dalam program pembangunan masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio merupakan faktor penghambat karena tidak semua usulan tersebut dapat ditampung karena perlu ada program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam setiap usulan yang berikan oleh masyarakat.

Kondisi ini yang juga dikeluhkan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh informan IM selaku masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio yang mengatakan :

“Usulan yang kami berikan ini tidak semua dapat dijadikan prioritas sehingga ada beberapa persoalan yang kami rasakan belum dapat diberikan solusinya oleh pemerintah dengan cepat hal ini dilakukan secara bertahap saya pikir karena ada prioritas utama”  
(Hasil wawancara dengan IM, tanggal 14 Mei 2016)

Selanjutnya pandangan yang sama dikemukakan informan US yang mengatakan bahwa :

“Usulan perbaikan got, pengadaan peyemprotan dapat dilakukan tahun ini namun masih ada agenda lainnya yang belum diakomodir seperti perbaikan jalan dengan paving blok belum rampung secara menyeluruh pada hal sudah diusulkan sebelumnya”  
(Hasil wawancara dengan US, tanggal 13 Mei 2016)

Kemudian informan dari masyarakat umum yakni SY mengatakan bahwa :

“Sejauh ini masih ada sejumlah usulan yang menjadi sekedar saran saja karena kami ingin masyarakat betul-betul merasakan dampak dari apa yang telah direncanakan bersama”  
(Hasil wawancara dengan US, tanggal 14 Mei 2016)

Selanjutnya penjelasan lebih mendalam mengenai persoalan lamanya proses usulan yang diberikan masyarakat direspon oleh pemerintah dikomentasi GN sebagai tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Secara umum kita lihat usulan yang masuk adalah masalah-masalah pembangunan seperti persoalan infrastruktur jalan yang rusak, sarana kesehatan, dan sarana sosial masyarakat tidak semua dapat diakomodir karena ada program yang terlebih dahulu diprioritaskan tiap tahunnya”  
(Hasil wawancara dengan GN, tanggal 18 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dapat diperoleh penjelasan bahwa kendala lamanya persoalan yang diusulkan oleh masyarakat belum dapat dijawab oleh pemerintah karena mesti ada program yang menjadi prioritas utama sehingga proses pembangunan dan setiap aspirasi oleh masyarakat akan diakomodir secara bertahap berdasarkan skala prioritasnya.

Berdasarkan serangkaian penjelasan tentang faktor-faktor penghambat peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya sejumlah instansi yang terlibat dalam program pembangunan ditambah dengan jumlah anggaran yang disiapkan terkait program pembangunan di Kelurahan Bonto Makkio menjadi faktor pendukung disamping itu adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan maupun menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Bonto Makkio merupakan faktor pendukung peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Sementara faktor penghambat LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat yaitu banyak usulan yang masuk terkait dengan usulan masyarakat dalam program pembangunan masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio merupakan faktor penghambat karena tidak semua usulan tersebut dapat ditampung, perlu ada program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam setiap usulan yang berikan oleh masyarakat selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menjawab semua persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat memerlukan waktu yang lama karena dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas menjadi faktor penghambat dari peran LPM ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat yaitu memwadahi kepentingan masyarakat dan memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan kepentingan tersebut karena LPM merupakan wadah yang dekat dengan kepentingan masyarakat dan mengenal persoalan yang terjadi hal ini tergambar dari keaktifan LPM dalam Musrembang dengan menyampaikan usulan dari masyarakat berupa kebutuhan maupun persoalan yang ada di Kelurahan Botto Makkio. Selain itu LPM juga sebagai mediator yaitu meyabungkan keinginan masyarakat terkait permasalahan yang ada dan aktif dalam mensosialisasikan beberapa program pemerintah kota seperti Makassar tidak rantasa dan lorong garden yang melibatkan peran serta masyarakat. LPM juga sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam berbagi program pemerintah kota dan LPM juga sebagai dinamisator yang dapat dilihat dari peran aktif LPM dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan sebagai contoh sosialisasi

hukum dan MTR yang melibatkan berbagai pihak terkait.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran LPM sebagai penyalur aspirasi masyarakat dapat dilihat dari adanya dukungan dari sejumlah instansi dan adanya anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program yang dicanangkan merupakan salah satu faktor pendukung, disamping itu partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam kegiatan dan program pembangunan juga merupakan faktor pendukung. Sementara banyak usulan yang masuk yang kemudian tidak dapat diterima secara keseluruhan karena perlu ada program yang menjadi prioritas merupakan faktor penghambat yang dihadapi LPM. demikian juga dengan lamanya sebuah persoalan diatasi oleh pemerintah kota menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini hal ini terjadi karena tidak semua program atau kegiatan dapat menjadi prioritas utama.

## **B. SARAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. LPM perlu mempertimbangkan dengan baik setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi masyarakat agar dalam menentukan setiap kegiatan yang menjadi prioritas utama dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan yang urgen ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Bonto Makkio.

2. Pemberdayaan masyarakat hendak menjadi perhatian seperti perlunya pelatihan tentang kewirausahaan di Kelurahan Bonto Makkio mengingat begitu banyak ruko yang di wilayah tersebut agar program pemabangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan permasalahan kebersihan dan keamanan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djopari & Solihah, Ratnia. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Diklat, 2002. *Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim*, Samarinda, Dilaksanakan Desember 2002.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSKK-UGM
- E.St Harahap, dkk. (2007). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Friedman, M. Marilyn. 1998. *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC
- Harijani, Doni Rekro, 2001. *Etos Kerja Perempuan Desa, Realisasi Kemandirian dan Produktifitas Ekonomi*. Yogyakarta : Philosophy Press
- Harjanto. 2008. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta
- Koentjaraningrat, 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Minarni, 2014. *Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013)*. Jurnal Ilmiah : Perspektif, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2014.
- Ndraha, Taliziduhu. 1994. *Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri*, Jakarta: IIP
- Parson, Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : FE UI.

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 *Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar.*
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 *Tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009.*
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010.*
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009-2014.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 *Tentang Kelurahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 *Tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025.*
- Purwoko, Budi. 2008. *Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling.* Surabaya : Unesa University Press.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman. 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa,* Jakarta : Materi Diklat Pemberdayaan.
- Taruna, JC Tukiman. 2001. *Pendidikan Nonformal Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat.* Makalah disampaikan pada pertemuan

tahun IV SPPM, Solo, 25- 28 September 2001. Dapat diakses dari [www.balaidesa.or.id/tukiman.htm](http://www.balaidesa.or.id/tukiman.htm).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 *Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Derah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar*.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 *Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi*.